

PENDIDIKAN FAKTOR UTAMA PEMBINAAN RAKYAT MISKIN

L. HARIANDJA

I. PENDAHULUAN

Pembinaan orang-orang miskin untuk melepaskan mereka dari garis kemiskinan adalah pekerjaan yang amat sulit. Orang-orang miskin sebagai lapisan masyarakat yang paling lemah pada umumnya sulit terjangkau oleh usaha-usaha pelayanan dari pemerintah.

Sebagai gambaran tentang kemiskinan di Indonesia, wakil ketua APBN Chalik Ali mengatakan : 45% dari jumlah penduduk Indonesia sekarang ini taraf kehidupannya belum tersentuh perbaikan dan masih dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan perkapita di bawah 100 dollar Amerika setiap tahunnya¹

Di dalam kenyataan disadari atau tidak, golongan masyarakat yang termasuk kategori miskin atau orang-orang yang berpendapat rendah, selalu tersembunyi dan menyembunyikan diri, sehingga ada kecenderungan untuk terlupakan dalam proses pelayanan masyarakat.

Cara menghadapi masalah-masalah dan kebutuhannya pada umumnya mereka menolong diri-sendiri (self help) dalam arti keluarga, kerabat dan famili-famili mereka sendiri. Karena

1 Surat kabar *Merdeka*, 8 Januari 1979

keadaan ekonomi mereka sangat lemah kehidupan mereka penuh kerawanan. Misalnya mereka kurang gizi, tidak mampu untuk menyekolahkan anak, mudah kena penyakit busung lapar, ada kalanya mereka mudah kena hasutan dan bujukan-bujukan dengan dalih kemiskinan itu dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, malahan kadang-kadang untuk memenuhi makan sehari-hari misalnya, untuk keperluan pengobatan, biaya menyekolahkan anak, untuk keperluan pesta-pesta dan upacara-upacara seperti perkawinan, upacara adat dan sebagainya, mereka mengikatkan diri dalam "ijon dan rentenir." Situasi yang demikian itu menyebabkan makin lama kemiskinan mereka makin mendalam.

Pendekatan terhadap orang-orang miskin harus diadakan secara menyeluruh dan terpadu, agar pembinaan itu dapat berhasil dengan baik (Sosial, Pendidikan, Dalam Negeri, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Koperasi, Pertanian, Keamanan dan lain-lain).

Berhubung orang-orang miskin adalah orang (subyek) yang harus berubah dari keadaan kemiskinan ke kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, maka pertama-tama ia harus berubah sikap, mempunyai tekad yang kuat dan memiliki pengetahuan serta ketrampilan untuk itu. Perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan tersebut diperoleh dari pendidikan. Dengan kata lain faktor pendidikan adalah faktor utama dalam pembinaan orang-orang miskin atau orang-orang yang berpendapatan rendah, dan harus mengikuti proses pembinaan sejak permulaan sampai dengan akhir. DR. W.P. Napitupulu mengatakan : "Jurang yang ada antara si kaya (the have) dengan si miskin (the have not) pada dasarnya bukan bersifat material, melainkan pendidikan. Sebab hanya karena mereka tidak memiliki pengetahuan dan kecakapan fungsional, maka mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena mereka tidak mempunyai sikap membangun dan modernisasi, maka mereka tidak mencari cara-cara baru."¹

1 Dr. W.P. Napitupulu, *Strategi dan Manajemen Pendidikan Nonformal*, 1977, hal. 3

Maka sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan : "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran", maka program pemerintah dalam Pelita III bidang "pendidikan" telah disusun secara menyeluruh untuk menjangkau semua warga negara untuk pemerataan pendidikan yang diselenggarakan baik melalui sekolah maupun di luar sekolah. Program yang berhubungan dengan "Pendidikan Luar Sekolah" dalam GBHN bidang Pendidikan sub. a dan f dinyatakan :

"Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, termasuk kepramukaan, latihan-latihan ketrampilan dan pemberantasan buta huruf dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada."¹

Untuk menyusun program pembinaan dan pendidikan orang-orang miskin, hendaknya didasarkan pada realitas kehidupan orang-orang miskin sebagaimana mereka hidup menyangkut; tingkat kehidupannya, tingkat pendidikannya, keadaan sosial dan adat-istiadatnya, keadaan mentalitas mereka, sumber-sumber dan potensi-potensi yang ada, masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhannya dan lain-lain.

Perlu disadari bahwa perkembangan yang baik dan laras dari usaha pembinaan itu, tergantunglah dari kegiatan sendiri (auto-aktivita) orang-orang miskin baik secara individual maupun kelompok sebagai akibat dari usaha pendidikan. Orang-orang miskin dididik agar hidup realistik dan menjadi aktif. Aktivitas itu hendaknya direncanakan secara seksama dan terpadu dengan semua usaha yang ditujukan dan yang berhubungan dengan pembinaan orang-orang miskin (Sosial, Dalam Negeri, Kesehatan, Agama, Pertanian, Pendidikan, Tenaga Kerja dan Koperasi dan lain-lain). Dan dituntut adanya koordinasi yang sebaik-baiknya dalam pelaksanaan pembinaan agar hasilnya dapat tercapai seperti yang diharapkan. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan orang-orang miskin dan orang-orang yang berpendapatan ren-

1 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Bidang Pendidikan sub. a dan f.

dah agar rencana pembinaan dapat disusun secara realistik. Hal-hal yang kiranya perlu diketahui oleh para petugas yang berkecimpung dalam pelayanan dan pembinaan orang-orang miskin untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan mereka antara lain ialah :

1. Sumber-sumber kemiskinan
2. Paket minimum pendidikan bagi seorang warga negara untuk dapat ikut serta dan berperan aktif dalam pembangunan
3. Langkah-langkah dalam pendidikan orang-orang miskin.

II. SUMBER-SUMBER KEMISKINAN

Bermacam-macam sumber kemiskinan yang menyebabkan orang-orang miskin sulit untuk berubah dari kemiskinannya. Pada kebanyakan orang khususnya orang-orang miskin dan kurang terpelajar sumber-sumber kemiskinan itu kurang disadari dan diketahui bahwa hal itu akan dapat menyulitkan kehidupannya dan menyebabkan kemiskinan mereka makin lama makin dalam. Pada dasarnya sumber-sumber kemiskinan seperti disebutkan dalam tulisan ini mempunyai jalinan satu sama lainnya. Misalnya kurangnya tanah untuk sumber penghasilan bagi keluarga, disebabkan cepatnya pertumbuhan penduduk (terlalu besar jumlah anggota keluarga), mudahnya berkembang sistim ijon dan rentenir, karena orang-orang miskin membutuhkan mereka dan lain-lain.

Beberapa contoh sumber kemiskinan itu dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Tanah Milik yang Sempit

Tanah milik sebagai sumber penghasilan terlalu sempit untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga, terutama di Pulau Jawa. Diantara 136 juta orang penduduk Indonesia, 90 juta berada di Pulau Jawa, kepadatan penduduk 625 orang/km², malah di tempat-tempat tertentu kepadatan penduduk telah mencapai 2000 orang/km². Kira-kira 80% di antaranya berada di Daerah Pedesaan dan 60% dari jumlah tersebut hidup dari

pertanian. Jumlah keluarga yang memiliki tanah kurang 0,5 ha cukup besar.¹ Ditambah dengan sistem *buruh tani* yang kurang menguntungkan bagi perkembangan keluarga-keluarga miskin. Keluarga-keluarga miskin di Daerah Pedesaan yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah kurang dari 0,25 ha, pada umumnya menjadi buruh tani dan hidup mereka sangat tergantung kepada para pemilik (tuan-tuan) tanah. Peraturan-peraturan penggarapan tanah oleh buruh tani kurang menguntungkan pihak penggarap, sehingga mereka sulit lepas dari kemiskinannya. Sedang sebahagian dari orang-orang miskin itu, hidup dari berdagang kecil, seperti menjual sayur-sayuran, menjual kayu api yang dicari dari hutan, mengusahakan warung kecil dan lain-lain. Mereka kurang memperhitungkan keuntungan, karena pikiran mereka kebanyakan belum sampai ke arah perhitungan-perhitungan seperti itu. Mereka telah puas apabila mendapat uang sedikit sekedar untuk membeli makanan bagi keluarga mereka. Mereka belum dapat menghargai tenaga kerja.

2. Jumlah Anggota Keluarga Besar

Walaupun belum ada penelitian yang terperinci mengenai "hubungan antara tingkat pendidikan dengan penerimaan dan pelaksanaan keluarga berencana" oleh akseptor keluarga berencana, ada kecenderungan bahwa penerimaan dan pelaksanaan keluarga berencana kebanyakan pada lapisan masyarakat yang telah berpendidikan. Sedangkan keadaan sebaliknya, bagi lapisan masyarakat yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah, sulit untuk menerima keluarga berencana. Bagi masyarakat yang telah berpendidikan, keluarga berencana dirasakan sebagai suatu keharusan dengan dasar pertimbangan yang cukup matang yakni perhitungan pendapatan keluarga dengan besarnya jumlah anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Bagi keluarga miskin sulit menyadari akan pentingnya keluarga berencana. Mereka sangat terikat pada tradisi yang mengatakan misalnya : Anak membawa rejeki sen-

1 Pendidikan Masyarakat, Proyek Pendidikan Nonformal 1977

diri-sendiri, anak adalah takdir dari Tuhan, anak adalah merupakan jaminan untuk orang tua sebab anak-anak dapat membantu orang tua dan lain-lain.

Jumlah anggota keluarga yang besar (banyak anak) dengan pendapatan keluarga yang kecil menyebabkan keluarga-keluarga miskin sulit lepas dari kemiskinannya, malahan tingkat kemiskinannya makin lama makin mendalam.

3. Sulitnya untuk Mendapatkan Pekerjaan

Laju perkembangan angkatan kerja tiap tahun tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia untuk menampung tenaga kerja tersebut. Sulitnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan menyebabkan makin banyak orang menganggur. Hal ini menyebabkan bertambahnya orang-orang miskin. Walaupun pemerintah telah berusaha keras untuk melaksanakan pembangunan dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru, namun belum mampu untuk menyerap semua tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang tidak berpendidikan.

4. Ijon dan Rentenir

Suatu gejala sosial yang kurang menguntungkan atau malah mengganggu perkembangan keluarga-keluarga miskin adalah sistem ijon dan rentenir yang sudah berurat berakar dalam kehidupan masyarakat, khususnya di lapisan masyarakat yang berpendapatan rendah atau orang-orang miskin. Ada kalanya masyarakat telah menganggap sistem ini sebagai hal yang berjalan wajar. Kadang kala mereka berkata, kalau tidak ada uang yang mereka peroleh dari ijon atau rentenir, kehidupan mereka akan lebih morat-marit. Walaupun pemerintah telah berusaha keras untuk mengikis habis sistem ijon dan rentenir dengan bermacam-macam usaha seperti Kredit Candak Kulak, KUD, Bimas, KIK dan lain-lain akan tetapi daya jangkauannya masih terbatas. Sistem ijon dan rentenir di lapisan masyarakat miskin dan berpendapatan rendah mempunyai jalinan kuat yang mengikat orang-orang miskin/orang-orang yang berpendapatan rendah dengan rente yang besar, dari tahun-ketahun sehingga

sulit untuk mengembalikannya dan apa yang ada pada mereka terpaksa dilepaskan misalnya tanah, rumah dll. Dengan cara yang demikian mereka akan masih lebih jauh tenggelam ke jurang kemiskinan. Hal ini hanya dapat terpecahkan apabila ada bantuan sosial, dan usaha-usaha pemerintah lebih diratakan dan lebih mengutamakan orang-orang miskin atau orang-orang yang berpendapatan rendah dengan jalan KUD, Kredit CandaK Kulak dan lain-lain. Harus diadakan suatu sistem berupa usaha-usaha pelayanan yang dapat mengimbangi dan lama kelamanaan menghapuskan sistem ijon dan rentenir.

5. Adat-istiadat

Suatu sistem yang berakar dalam kebudayaan dan adat-istiadat yang merupakan sumber kemiskinan ialah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan adat-istiadat seperti sumbangan-sumbangan, biaya untuk upacara-upacara perkawinan, upacara-upacara penguburan, pesta-pesta tradisi yang merugikan dan lain-lain.

Selain sumber-sumber kemiskinan seperti disebutkan di atas, masih banyak sumber-sumber lainnya yang menyebabkan kemiskinan atau kurang menguntungkan bagi perkembangan keluarga-keluarga miskin. Misalnya pola konsumsi yang tidak seimbang akibat masuknya advertensi-advertensi barang-barang luks sampai ke desa-desa melalui media komunikasi, faktor kemalasan dan kurangnya daya kreasi dan lain-lain. Semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam kategori *adanya faktor kebodohan* atau *rendahnya pendidikan*. Mereka kurang mampu menganalisa situasi kehidupan mereka sendiri. Tidak ada kemampuan untuk berkreasi, mereka tidak mempunyai cara-cara baru untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitarnya, tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan serta sulit menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan situasi/perkembangan masyarakat yang berjalan dengan cepat. Prof. DR. Sartono mengatakan : "Melihat kenyataan pedesaan sekarang, optimisme pengembangan pedesaan bisa timbul kalau tenaga kerja terampil meningkat, mobilitas pengetahuan naik

dan Keluarga Berencana berhasil. Tentu saja ini harus didukung oleh sistem pemasaran untuk menampung hasil produksi orang-orang miskin.”¹

Berdasarkan atas pandangan di atas, perbaikan orang-orang miskin hanya mungkin tercapai kalau ada titik pertemuan antara adanya kesadaran, perubahan sikap, kesediaan, kemauan, tekad, kerja keras, disiplin serta keuletan dari orang-orang miskin itu sendiri, dengan bantuan yang diberikan kepada mereka yang bersifat menolong, mendidik, menunjang, mempercepat dan memperlancar proses pembinaan/perbaikan hidup orang-orang miskin. Dengan ketentuan bahwa bantuan yang diberikan harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembinaan. Misalnya kepada orang-orang miskin diberikan kursus tentang keterampilan dalam bidang industri rumah tangga, tetapi karena sulitnya untuk mendapatkan biaya/modal, motivasi orang-orang miskin menjadi lemah dan kepercayaan terhadap kegunaan mengikuti pendidikan keterampilan menjadi pudar. Maka dalam hal ini pelaksanaan pembinaan harus disesuaikan dengan kegiatan usaha pelayanan lainnya seperti waktu penyaluran biaya dari Kredit Canda Kulak, KUD, KIK dan lain-lain. Atau dengan kata lain, dibutuhkan perencanaan yang seksama, cermat dan terpadu dari semua instansi yang berhubungan dengan pembinaan orang-orang miskin.

Sekarang tinggalah memperbincangkan lebih lanjut tentang isi pendidikan yang mana atau paket pendidikan yang mana seyogyanya diberikan kepada orang-orang miskin, agar mereka mampu untuk melaksanakan perbaikan hidup mereka. Di dalam tulisan ini secara terperinci tidak dibicarakan isi pendidikan yang mana, sebab tidak mungkin untuk memberikan isi pendidikan yang sama kepada semua kelompok orang miskin dan mungkin hal itu tidak dikehendaki, karena isi pendidikan yang sesuai adalah yang didasarkan atas kebutuhan. Akan tetapi dalam tulisan ini masih diberikan sedikit gambaran tentang *paket minimum pendidikan* bagi setiap warga negara agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

1 Surat kabar *Kompas*, 23 Januari 1979

III. PAKET MINIMUM PENDIDIKAN

Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya hendaknya berkorelasi fungsional dengan pembangunan, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Itulah masyarakat yang ingin kita bangun dan kita membaktikan pendidikan kepada pembangunan itu dalam arti seluas-luasnya, yakni bukan saja dalam arti mendidik dan mengajarkan pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan kepada semua warga negara, melainkan pula dalam arti membangun sikap-sikap baru pada semua anggota masyarakat. Dalam melaksanakan usaha-usaha pembangunan, masyarakat dididik sambil bekerja. Pendidikan teknis seperti pertanian, peternakan, industri, ekonomi rumah tangga, koperasi dan lain-lain, diberikan kepada mereka bersama dengan pendidikan kepribadian dan pembentukan sikap-sikap baru. Pengalaman di berbagai negara, pendidikan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang berpendapatan rendah selalu bertitik tolak dari bidang perekonomian, yaitu usaha untuk meningkatkan produksi dan penghasilan dan biasanya pada usaha-usaha yang berhubungan dengan pertanian. Mereka dididik agar pandangannya terbuka dan mendapat sikap-sikap baru dalam lingkungan dan dalam pekerjaan mereka. Mereka harus menyadari kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan dibawah pengaruh pendidikan mereka menemui jalan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.

Tetapi hal tersebut di atas dalam kenyataan bukan sesuatu yang mudah. Masih ada hal-hal yang perlu dipertanyakan antara lain : Apakah pendidikan yang bersifat teknis dalam pembangunan mudah diajarkan kepada mereka-mereka yang buta-huruf dan yang tidak mempunyai pengetahuan-pengetahuan dasar? Bagaimana keadaan pendidikan orang-orang miskin atau orang-orang yang berpendapatan rendah? Apakah mereka sudah bebas dari buta-huruf dan telah memiliki pengetahuan dasar untuk kehidupan mereka? Akhirnya pertanyaan lebih lanjut ialah apakah setiap warganegara telah memperoleh *paket minimum pendidikan* dan apa paket minimum itu, agar seorang warga

negara dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan? Hal ini harus jelas dalam konsepsi pendidikan yang disusun secara menyeluruh.

Negara yang telah melaksanakan kewajiban belajar sudah memiliki konsepsi yang jelas mengenai paket minimum pendidikan bagi seluruh warga negaranya. Dalam paket minimum pendidikan itu dirumuskan *kebutuhan pendidikan mana* diberikan kepada setiap warga negara, agar ia dapat berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab. Dalam pengertian ia telah memperoleh sikap-sikap, kecakapan-kecakapan dan pengetahuan sebagai bekal hidup dan bertanggungjawab dalam masyarakat. Komisi Internasional Pengembangan Pendidikan (International Commission on the Development of Education), menyarankan *enam unsur pokok* sebagai gambaran dari paket minimum yang oleh tiap bangsa dan negara dimasukkan ke dalam paket minimum belajar, sedang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan keadaan negara masing-masing. Unsur-unsur itu adalah sebagai berikut :

1. Sikap-sikap positif ke arah kerjasama dan tolong menolong dalam bekerja, dalam pembangunan nasional, dalam masyarakat dan tidak hanya melanjutkan belajar tentang nilai-nilai etis belaka. Dalam kenyataan, sikap-sikap positif ini akan ditemukan dalam pola tingkah laku dan ekspresi-ekspresi di dalam keluarga, dalam masyarakat dan dalam seluruh lingkungan hidup.
2. Membaca dan menulis fungsional meliputi :
 - 2.1. Membaca dan mengerti seluruhnya isi surat-surat kabar, poster-poster dan majalah-majalah yang berhubungan dengan misalnya pertanian, kesehatan dan lain-lain, dan petunjuk-petunjuk cara penggunaan alat-alat.
 - 2.2. Dapat menulis surat misalnya kepada teman maupun kepada petugas-petugas pemerintah untuk mendapatkan keterangan-keterangan.
 - 2.3. Untuk menggunakan perhitungan-perhitungan yang terpenting, misalnya menghitung luas tanah dan bangunan, menghitung biaya-biaya pertanian, perhitungan laba-rugi dan lain-lain.
3. Sikap ilmiah dan pengertian sederhana tentang proses-proses alam di daerahnya, misalnya berhubungan dengan kesehatan, sanitasi, tanam-tanaman dan peternakan dan lain-lain.
4. Pengetahuan dan kecakapan fungsional untuk membangun dan mengurus rumah tangga, termasuk usaha-usaha seperti mempertahankan kesehatan keluarga, keluarga berencana, perawatan anak, gizi, kegiatan kebudayaan dan rekreasi, pemeliharaan orang sakit, berbelanja dan penggunaan uang, membuat pakaian, perbaikan rumah dan perbaikan lingkungan.

ANALISA

5. Pengetahuan dan kecakapan yang berguna untuk mencari nafkah, termasuk tidak hanya untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga pengetahuan yang bermacam-macam tentang pertanian dan nonpertanian.
6. Pengetahuan dan kecakapan yang berguna untuk berpartisipasi dalam pemerintah negara meliputi : ideologi, pengertian sejarah nasional, pengertian tentang masyarakat, kesadaran akan fungsi pemerintah, pengertian pajak dan kepentingan umum, pelayanan-pelayanan sosial, arti dan manfaat dari koperasi dan lain-lain.¹

Apabila kita meninjau unsur-unsur seperti dimaksudkan di atas yang termasuk dalam paket minimum pendidikan agar setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, nampaknya ukuran itu sudah sangat komprehensif. Sudah barang tentu tugas pelaksana utama pendidikan untuk merealisasikan paket minimum itu adalah pendidikan di bangku sekolah (formal) yang diterima anak sejak kecil. Sedang apabila oleh karena sesuatu hal seorang warga negara terlantar pendidikannya artinya tidak berkesempatan untuk mendapatkan paket minimum itu, dia pada umumnya dilayani oleh yang disebut "Pendidikan Luar Sekolah" (Non-Formal Education), sebagai suatu bentuk pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan, kendatipun secara terpisah dan aktivitasnya diperluas untuk melayani kebutuhan-kebutuhan belajar, dan sebagai pengganti pendidikan yang tidak diperoleh dalam pendidikan di sekolah. Misalnya pemberantasan buta-huruf dan pendidikan-pendidikan keterampilan lainnya yang dibutuhkan untuk kehidupannya.

Sekarang kita kembali ke situasi pendidikan kita di Indonesia. Pertanyaan ialah apakah program paket minimum pendidikan itu sudah dapat diterapkan di Indonesia? Yang jelas adalah bahwa sekarang Komisi Pembaharuan Pendidikan kita sedang berusaha keras untuk menemukan suatu konsepsi Pendidikan Nasional yang menyeluruh dalam rangka membentuk manusia Indonesia yang Pancasila, dan mungkin di dalamnya telah termasuk program paket minimum pendidikan di negara kita.

1 Laporan Unicef tentang Non-Formal Education, 1972

Di dalam kenyataan sekarang, di mana masih banyak orang yang buta-huruf dan tidak berpendidikan, maka program-program pendidikan luar sekolah hendaknya lebih digalakkan baik kepada anak-anak dan pemuda maupun kepada orang-orang dewasa yang karena suatu hal pendidikan mereka terlan-tar. Lebih-lebih pendidikan orang-orang miskin dan orang-orang yang berpendapatan rendah, harus dihadapi secara serius agar pemerataan hasil pembangunan ini dapat berjalan dengan baik.

IV. PENDEKATAN

Pendidikan yang diberikan kepada orang-orang miskin adalah pendidikan yang betul-betul dibutuhkan agar mereka dapat mempertahankan diri dan kemudian dapat mengangkat diri ke arah kehidupan yang lebih layak. Jadi sasaran pelayanan pendidikan dalam hal ini adalah orang-orang miskin yang betul-betul membutuhkannya. Perlu dijelaskan tujuan pendidikan untuk membantu orang-orang miskin dan bentuk usaha-usaha pendidikan, agar tujuan itu dapat tercapai.

Program pendidikan untuk membantu orang-orang miskin hendaknya disusun secara konkrit dan realistis, dan didasarkan atas keadaan nyata dari orang-orang miskin itu sendiri. Untuk itu diperlukan *pengkajian dan analisa* yang mendalam tentang keadaan orang-orang miskin, penyusunan program yang konkrit dan realistis berdasar atas hasil pengkajian tersebut, pelaksanaan yang sebaik-baiknya dari program itu untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan dan evaluasi untuk melihat sejauh manakah *tepat dan manfaat guna* pendidikan untuk membantu perbaikan hidup orang-orang miskin.

Pengkajian dan analisa itu menyangkut antara lain : 1) pekerjaan, jumlah anggota keluarga, pendapatan perkapita dan pekerjaan-pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilan; 2) tingkat pendidikan orang-orang miskin dan tingkat pendidikan anggota-anggota keluarga; 3) tingkat kemiskinan yang dilihat dari harta milik seperti tanah (sawah, ladang, kebun dan pekarangan), ternak, rumah, alat-alat produksi dan barang-

barang investasi lainnya; 4) keadaan kesehatan baik kesehatan lingkungan, gizi, kesehatan fisik maupun kesehatan mental; 5) sistem-sistem sosial yang mungkin menjadi sumber kemiskinan seperti sistem ijon, rentenir, upacara-upacara, pandangan terhadap keluarga berencana, perjudian-perjudian, pemborosan-pemborosan dan lain-lain; 6) sistem perekonomian yang dapat menghambat perbaikan kehidupan orang-orang miskin seperti sistem pemasaran hasil produksi orang-orang miskin, pola konsumsi, sulitnya untuk mendapatkan modal dan lain-lain; 7) kemungkinan-kemungkinan dan potensi-potensi yang ada di sekitarnya yang dapat dimanfaatkan untuk menolong perbaikan kehidupan orang-orang miskin; 8) dan lain-lain yang dirasakan perlu untuk memperjelas situasi kehidupan orang-orang miskin.

Berdasar atas hasil pengkajian dan analisa tentang kehidupan orang-orang miskin tersebut dapatlah dilihat masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang riil yang dialami oleh mereka dan dengan demikian dapat disusun program yang konkrit dan realistis untuk memperbaikinya.

Adapun proses dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan seperti dirumuskan dalam program melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendidikan Keterampilan

Pendidikan keterampilan diberikan kepada orang-orang miskin agar mereka dapat memanfaatkan kepunyaannya sebaik mungkin. Orang-orang miskin masih mempunyai suatu milik, yang seringkali mereka tidak mempergunakannya sebaik mungkin, dan penyalahgunaan dari milik itu menyebabkan mereka masih lebih miskin. Umpama : Mereka mempunyai halaman dan pekarangan rumah, sekalipun amat kecil, akan tetapi halaman dan pekarangan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Ekonomi rumah tangga mereka tidak teratur. Mereka tidak memperhatikan kesehatan dan kebersihan, baik makanan maupun kesehatan lingkungan. Mereka tidak mempergunakan tenaga sendiri maupun tenaga anggota-anggota keluarga dengan

baik. Untuk itu diperlukan bantuan pendidikan. Dengan jalan mendidik diharapkan bahwa mereka dapat berubah sikap dan mau menyadari keadaannya sendiri. Isi pengajaran yang diberikan misalnya selain pengajaran kepada mereka yang buta-huruf diberikan cara-cara mengusahakan halaman dan pekarangan rumah, usaha perbaikan gizi keluarga, usaha kesehatan lingkungan, usaha peternakan, usaha ekonomi rumah tangga dan lain-lain. Pokoknya semua isi pendidikan yang memungkinkan orang-orang miskin mengubah sikap dan agar secara rasional dapat menghadapi situasi hidupnya untuk mencari jalan dan cara memperbaikinya. Semua bantuan pendidikan yang diberikan kepada orang-orang miskin, agar mereka mempergunakan miliknya sebaik mungkin dan terbuka pikiran mereka kepada kemungkinan-kemungkinan yang tersedia di sekitarnya. Dengan bantuan itu kita dapat menjaga, agar keadaan mereka tidak lebih merosot lagi.

2. Pendidikan untuk Penciptaan Usaha-usaha yang Produktif

Mereka juga harus dididik menciptakan usaha-usaha produktif, ialah kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan uang, seperti kegiatan pertanian, peternakan, industri rumah tangga, kegiatan perdagangan dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan ini, walaupun dalam bentuk usaha-usaha yang paling kecil, biasanya dapat dipakai untuk membantu orang-orang miskin. Dalam kegiatan pertanian misalnya menanam sayur-sayuran atau buah-buahan di halaman atau pekarangan rumah, yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga atau dijual untuk mendapatkan uang. Di samping tanaman umur pendek yang biasanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, secara rasional mereka juga disadarkan, agar mereka mau menanam tanaman jangka panjang, dan lambat laun ekonomi mereka dapat lebih tertolong, misalnya menanam cengkeh, kelapa, kopi dan lain-lain, sebab tanaman itu memberikan hasil yang nilainya lebih tinggi. Usaha-usaha peternakan di mana orang-orang miskin dapat berpartisipasi misalnya peternakan ayam, itik, kambing, domba, lembu, babi, pemeliharaan

ikan dan lain-lain yang mempunyai pasaran. Usaha-usaha rumah tangga misalnya pembuatan pakaian, pertukangan kayu, anyam-anyaman, ukir-ukiran dan lain-lain. Selain itu masih banyak kemungkinan home-industry yang dapat dijalankan menurut kemampuan daerah masing-masing. Dalam bidang usaha perdagangan misalnya membuka warung kecil, perdagangan hasil pertanian dan peternakan dan lain-lain.

Untuk kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas, diperlukan *kecakapan, keahlian dan keterampilan*. Kebanyakan orang miskin yang mengusahakan usaha-usaha seperti tersebut di atas mengalami kegagalan, karena kurang cakap, kurang keahlian dan kurang ketelitian. Untuk mendapatkan kecakapan, keahlian dan ketelitian ini, tidak cukup kursus atau pengajaran yang bersifat teori-teori, melainkan mereka harus turut berbuat. Karena keahlian hanya diperoleh kalau mereka turut berbuat. Suatu contoh : seorang montir mobil menjadi montir yang baik dan dapat membuka bengkel karena ia pernah ikut bekerja di sebuah bengkel mobil; seorang tukang kayu di desa menjadi tukang, karena ia pernah ikut dan kerja di sebuah perusahaan meubel, dan lain-lain. Kalau seorang ikut agak lama dalam pekerjaan itu, maka ia menjadi lebih pandai. Dalam hal ini, orang-orang miskin hanya akan berhasil kalau dalam menjalankan usaha-usaha produktif betul-betul mereka berlatih serta menyadari seluruh seluk-beluk dan kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam menjalankan usaha-usaha itu. Dalam membina orang-orang miskin hendaknya dimulai dengan apa yang ada pada orang-orang miskin itu sendiri. Misalnya mereka jangan langsung dianjurkan untuk menjalankan usaha yang besar, kalau orangnya belum mampu untuk menjalankannya.

Jadi dalam hal ini, orang-orang miskin perlu dilatih dalam mengusahakan usaha-usaha produktif, dalam berbuat mereka belajar, sampai proses produksi semuanya dikuasai.

3. Pendidikan untuk Pengelolaan Usaha-usaha Produktif

Tahap berikut dalam pendidikan orang-orang miskin ialah tahap pengelolaan, yakni meningkatkan usaha-usaha produktif menjadi usaha ekonomis. Usaha-usaha ekonomis bukan usaha

untuk memenuhi kebutuhan secara individual saja, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan bersama. Agar suatu usaha ekonomis dapat berhasil dengan baik diperlukan pula pengelolaan yang baik. Dengan pengelolaan di sini dimaksudkan suatu tata-laksana dalam usaha produktif yang dilaksanakan, bermanfaat untuk kepentingan bersama dan membawa keuntungan kepada orang yang menjalankannya. Maka dari itu ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi supaya usaha produktif menjadi suatu usaha ekonomis, yakni supaya ada pasaran untuk produksi yang dihasilkan. Usaha ekonomis tidak terarah kepada pemenuhan kebutuhan individual, melainkan harus memenuhi *kebutuhan pasaran*. Orang yang mengerjakan suatu usaha ekonomis tidak memakan hasil yang diproduksinya sendiri, melainkan membawanya ke pasar untuk kepentingan umum, dengan syarat bahwa dengan membawa barang yang diproduksinya ke pasar, dia mendapat keuntungan yang cukup untuk menjamin kesejahteraan keluarganya.

Perlu diperhatikan bahwa dalam pengembangan usaha-usaha ekonomis untuk menaikkan pendapatan orang-orang miskin, harus ada pasaran untuk menampung hasil-hasil produksi itu. Tidak perlu memulai suatu usaha yang ternyata tidak ada pasarannya. Sebab hal itu pasti akan merugikan. Usaha untuk membuka pasaran dan mempertahankan pasaran sering kali dilupakan oleh pengusaha-pengusaha kecil; asal mereka mendapat keuntungan sedikit, mereka sudah puas. Sering kali mereka mendapat rugi karena kurangnya *pengelolaan* dari usaha-usaha itu. Yang sangat penting diperhatikan dalam pengelolaan itu ialah hubungan antara biaya produksi dengan hasil produksi. Supaya suatu usaha ekonomis dapat menguntungkan, hasil produksi harus lebih besar daripada ongkos produksi atau input harus lebih kecil daripada output.

Dalam hal ini orang-orang miskin harus dididik dalam pengelolaan, walaupun dalam bentuk yang sesederhana mungkin. Yang paling baik ialah kalau pendidikan itu terus mengikuti usaha-usaha produktif orang-orang miskin, sehingga sifatnya adalah membimbing mereka untuk terus meningkatkan perbaikan hidupnya. Dengan kata lain, pendidikan adalah syarat mutlak untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang miskin di dalam koordinasi yang terpadu dengan semua pelayanan yang ditujukan kepada orang-orang miskin.

V. PENUTUP

Berdasar atas uraian di atas, beberapa hal kiranya dapat dianggap sebagai kesimpulan untuk menutup tulisan ini atau mungkin menjadi perhatian bagi mereka yang memberikan pelayanan kepada orang-orang miskin.

Kiranya kita sependapat bahwa melepaskan orang-orang miskin dari garis kemiskinannya adalah suatu tugas yang berat tetapi mulia, baik dipandang dari segi kemanusiaan maupun dari segi Ketuhanan Yang Maha Esa yang terrealisasi dalam cinta sesama. Beratnya tugas itu ditandai dengan adanya penuh keterbatasan bagi orang-orang miskin untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan, terutama keterbatasan dalam bidang pendidikan dan bidang material.

Lancarnya pembinaan orang-orang miskin tergantung dari kegiatan sendiri (auto-aktivita) orang-orang miskin, baik secara individual maupun secara kelompok. Sedang bantuan pelayanan yang diberikan kepada mereka hanyalah merupakan sarana dan prasarana yang menunjang ke arah keberdiri-sendirian (self-help) dari orang-orang miskin. *Faktor pendidikan orang-orang miskin* sangat menentukan dalam proses perkembangan itu. Maka kegiatan-kegiatan *Pendidikan Luar Sekolah*, khususnya kepada orang-orang miskin, harus digalakkan dengan mendayagunakan semua sarana dan prasarana yang ada.

Program pendidikan kepada orang-orang miskin hendaknya disusun secara konkrit dan realistis. Untuk dapat menyusun rencana dan program tersebut, diperlukan *pengkajian dan analisa* yang mendalam tentang situasi dan tingkat kemiskinan dari orang-orang miskin agar dapat dilihat dengan jelas masalah-masalah dan kebutuhan mereka serta ditemukan cara pemecahan yang paling tepat.

Bentuk pelaksanaan pendidikan orang-orang miskin seyogyanya dalam bentuk *belajar dan berbuat* atau dengan kata lain, pendidikan mengikuti usaha-usaha produktif dari orang-orang miskin, agar mereka dapat lepas dari garis kemiskinan itu. Dan untuk seterusnya mereka dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan nasional.

